

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Masalah

Pembangunan desa memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam undang-undang ini, pembangunan desa diartikan sebagai upaya kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹ Dasar hukum ini menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan desa yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam keseluruhan prosesnya.

Partisipasi masyarakat desa diposisikan sebagai salah satu prinsip utama dalam undang-undang ini, khususnya dalam aspek pengaturan desa (Pasal 3), tujuan pengaturan desa (Pasal 4), dan penyelenggaraan pemerintahan desa (Pasal 24). Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan dapat terlibat secara aktif, tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dalam pembangunan desa. Partisipasi aktif masyarakat desa dalam

¹ Peraturan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pembangunan berperan penting untuk mencapai keberhasilan program-program desa serta untuk mendorong keberlanjutan pembangunan yang inklusif.²

Optimalisasi partisipasi masyarakat memerlukan kebijakan terstruktur dari pemerintah pusat serta program yang memperkuat peran masyarakat. Pemerintah berperan strategis dalam memberikan arahan dan regulasi demi tercapainya pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui berbagai program dan regulasi, Kementerian Desa tidak hanya memperkuat struktur pemerintahan desa, tetapi juga menyediakan pendampingan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur desa.³

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di bawah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas SDM untuk pembangunan desa. BPSDM menyusun kebijakan, program, dan anggaran terkait pengembangan SDM serta pemberdayaan masyarakat di desa dan daerah tertinggal.⁴ BPSDM bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program untuk memastikan efektivitas dan

² N. Sari, H. E. Parawu, & A. Taufik, "Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang Berkelanjutan," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 5, no. 4, 2024, h. 3-4.

³ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. "Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa." Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2014.

⁴ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), "Peta Strategis Pengembangan SDM Desa dan Daerah Tertinggal," diakses dari <https://bpsdm.kemendesa.go.id/> pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 10.00

mendukung terciptanya masyarakat desa yang mandiri dan berdaya saing.

Salah satu unit di bawah BPSDM yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). P3MD memiliki tugas utama dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas aparatur desa serta masyarakat secara langsung.

P3MD mendorong pengembangan kapasitas desa secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian dan pengelolaan potensi sumber daya secara optimal. Selain itu, P3MD menyediakan dukungan teknis bagi pemerintah desa, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, P3MD berkontribusi besar dalam mendorong terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam setiap tahap pembangunan desa, yang pada akhirnya akan mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.⁵

Pelaksanaan peran P3MD dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa membutuhkan dukungan individu yang memiliki komitmen dan kepedulian tinggi terhadap pembangunan desa. Sosok

⁵ Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), *Panduan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Peningkatan Kapasitas*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023.

ini dikenal sebagai pegiat desa, yaitu orang-orang yang aktif, berinisiatif, dan terlibat langsung dalam mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, serta menjalankan program bersama masyarakat.

Pegiat desa berfungsi sebagai agen perubahan yang berperan strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat. Mereka adalah penggerak yang menginspirasi dan memotivasi masyarakat desa untuk turut aktif dalam pembangunan. Dengan memahami dinamika dan potensi lokal, para pegiat desa membantu P3MD untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.⁶

Kolaborasi antara P3MD dan para pegiat desa ini menjadi kunci dalam menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Melalui sinergi ini, tujuan pemberdayaan yang inklusif dan partisipatif dapat tercapai, sehingga masyarakat desa mampu mengelola sumber daya mereka sendiri dan terlibat aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Peran pegiat desa dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung tujuan P3MD, jika upaya peningkatan kapasitas dilakukan secara menyeluruh bagi mereka. Pegiat desa, sebagai penggerak utama di lapangan, membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus agar dapat menjalankan peran mereka secara efektif sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, pemerintah melalui BPSDM dan P3MD

⁶ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Peran Pegiat Desa dalam Membangun Partisipasi Masyarakat*, diakses dari <https://kemendesa.go.id/> pada 18 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB

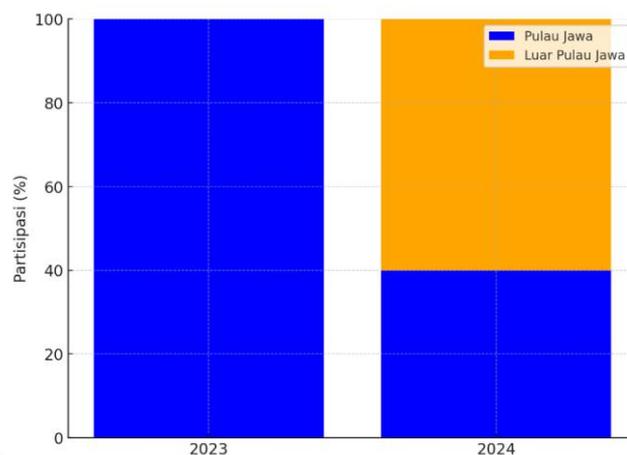
menginisiasi program Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Pegiat Desa (Bimtek) yang bertujuan untuk memberikan pembekalan yang dibutuhkan para pegiat desa.

Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Pegiat Desa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pegiat desa dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang relevan dalam mengelola serta memanfaatkan potensi desa secara optimal. Sasaran program ini mencakup individu-individu aktif di masyarakat desa, seperti tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh sosial pembangunan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat desa.⁷

Harapan utama dari program ini adalah menciptakan pegiat desa yang tidak hanya memahami kebutuhan lokal, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang mendukung pengelolaan desa secara mandiri dan berdaya saing. Untuk mencapai hasil ini, keberlanjutan program Bimtek sangat penting, termasuk memastikan bahwa peserta memperoleh manfaat maksimal dari pelatihan.

Keberlanjutan program Bimbingan Teknis tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya, tetapi juga pada kemampuan untuk mengukur keberhasilannya melalui evaluasi yang sistematis. Evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai tujuan dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi peserta.

⁷ *Term of Reference* Program Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Pegiat Desa, 2024



Gambar 1.1 Perubahan Sasaran Program Bimbingan Teknis

Sejak digagas pada tahun 2023, program Bimtek awalnya hanya menysasar provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Pada tahun 2024, cakupan program diperluas ke provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, yang menandai langkah strategis untuk menjangkau lebih banyak pegiat desa di berbagai wilayah. Perubahan ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam guna memastikan bahwa perluasan sasaran dapat diimbangi dengan kualitas pelaksanaan yang tetap optimal. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program ke depannya.

Berdasarkan observasi dokumen terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peningkatan Partisipasi Pegiat Desa, telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program ini. Pelaksanaan SKM oleh Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, (P3PMD) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam regulasi ini, unsur yang dievaluasi mencakup sembilan aspek, antara lain persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana.⁸

Pelaksanaan SKM yang memuat aspek tersebut diantaranya adalah persyaratan, terkait kelengkapan administrasi; prosedur, mengenai tata cara pelayanan; waktu pelayanan, menilai kecepatan layanan; serta biaya/tarif, yang melihat kesesuaian biaya. Selain itu, aspek produk spesifikasi mengevaluasi hasil layanan, kompetensi pelaksana menilai keahlian petugas, dan perilaku pelaksana mencerminkan etika dalam pelayanan. Penanganan pengaduan berfokus pada respons terhadap keluhan, sementara sarana dan prasarana memastikan ketersediaan fasilitas pendukung layanan.

Persepsi peserta terhadap berbagai aspek kegiatan digali melalui pertanyaan-pertanyaan dalam SKM yang mencerminkan pengalaman mereka selama mengikuti Bimtek. Contohnya, peserta diminta menilai kemudahan persyaratan administrasi, kejelasan prosedur, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kewajaran biaya. SKM juga mencakup aspek lain seperti kompetensi panitia, manfaat kegiatan, serta ketersediaan fasilitas untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas kualitas layanan yang diberikan.

⁸ Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Bimtek Pegiat Desa TW III (2024)*

Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan hasil positif dengan skor 3,54 dari 4,00, masuk kategori Sangat Baik. Meski demikian, skor ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pelatihan yang diharapkan. SKM cenderung menilai aspek administratif dan teknis, seperti prosedur, biaya, waktu, dan fasilitas, tanpa menggali hal-hal krusial seperti relevansi materi atau dampak pelatihan terhadap kemampuan praktis pegiat desa. Keterbatasan ini mencerminkan kurangnya peninjauan dalam perencanaan dan penyusunan instrumen evaluasi.

Berdasarkan observasi dokumen penyusunan SKM, ditemukan bahwa tahapan penyusunan instrumen survei ini tidak sistematis. Tidak adanya kisi-kisi yang jelas menjadi salah satu kelemahan signifikan, karena tanpa kisi-kisi, sulit memastikan bahwa setiap pertanyaan mencerminkan indikator yang relevan dengan tujuan evaluasi. Selain itu, format pertanyaan terlalu seragam, sehingga tidak mampu menangkap data kualitatif yang lebih mendalam, seperti persepsi peserta terhadap metode pelatihan dan pengalaman mereka selama mengikuti kegiatan. Meskipun telah menggunakan skala interval, instrumen ini juga belum melalui validasi yang memadai untuk menjamin relevansi setiap item dengan indikator yang ingin diukur secara komprehensif.

Wawancara dengan penanggung jawab kegiatan mendukung temuan dari observasi dokumen tersebut. Hasil wawancara ini mengungkap bahwa memang belum tersedia model atau sistem

evaluasi yang benar-benar terstruktur dan komprehensif. Sistem evaluasi yang ada saat ini masih bersifat parsial, hanya berfokus pada pengumpulan data kepuasan peserta tanpa mengintegrasikan analisis yang lebih mendalam terhadap kesesuaian kebutuhan peserta dengan hasil yang dicapai. Hal ini diperburuk oleh ketiadaan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang evaluasi, sehingga proses penyusunan dan pelaksanaan evaluasi belum sepenuhnya memenuhi standar yang ideal.

Survei yang digunakan selama ini diterapkan pada berbagai jenis kegiatan pelatihan tanpa mempertimbangkan relevansi aspek-aspek tertentu dengan karakteristik masing-masing program. Akibatnya, terdapat elemen evaluasi yang kurang sesuai untuk mengukur keberhasilan program secara spesifik, seperti aspek administratif dan teknis (misalnya persyaratan, waktu, biaya, dan penanganan pengaduan), yang kurang mampu menangkap indikator keberhasilan pelatihan secara mendalam. Beberapa tantangan terkait proses pembelajaran juga mulai teridentifikasi setelah kegiatan pelatihan selesai, seperti keterbatasan waktu, kesulitan peserta dalam memahami materi, serta kurangnya dukungan untuk memastikan proses belajar yang efektif. Hambatan-hambatan ini menunjukkan adanya celah dalam mengevaluasi aspek-aspek kritis, seperti kecukupan materi, efektivitas metode penyampaian, dan sejauh mana pembelajaran yang diharapkan tercapai.⁹

⁹ Wawancara dengan Moch Zaini Mustakim, Penanggung Jawab Kegiatan Bimbingan Teknis, 17 September 2024 pukul 13.30 WIB

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, menunjukkan bahwa pengembangan instrumen evaluasi yang lebih sistematis dan terstruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk menggali lebih dalam mengenai keberhasilan program. Instrumen evaluasi yang ada saat ini hanya mampu mengukur kepuasan peserta pada permukaan saja, tetapi tidak cukup mendalam untuk mengidentifikasi masalah pelatihan yang terjadi, hambatan yang dihadapi peserta, serta dampak jangka panjang dari program terhadap peningkatan kompetensi mereka. Ketiadaan instrumen yang valid dan reliabel menyebabkan kesenjangan antara tujuan program dan hasil yang tercapai. Tanpa adanya perbaikan dalam sistem evaluasi, upaya perbaikan kualitas layanan dan pelatihan kedepannya akan terhambat, sehingga mengurangi kualitas program secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif untuk menggali lebih dalam reaksi peserta terhadap program secara keseluruhan. Meskipun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memberikan gambaran mengenai kepuasan peserta, instrumen ini masih terbatas pada aspek administratif dan teknis. Evaluasi reaksi menjadi hal yang fundamental karena merupakan langkah awal yang mempengaruhi pengukuran pada tingkatan berikutnya dalam pendekatan Kirkpatrick. Pendekatan ini banyak digunakan dalam berbagai program pelatihan karena kerangkanya yang holistik dan sistematis, memberikan cara yang relevan dan menyeluruh untuk menilai keberhasilan program. Dengan

memahami bagaimana peserta merespons program, penyelenggara kegiatan Bimtek dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai manfaat yang dirasakan serta area-area yang memerlukan perbaikan.

Dengan instrumen evaluasi reaksi yang dirancang secara baik, pelaksanaan program Bimtek dapat terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa secara nyata dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat kontribusi program terhadap pembangunan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Pegiat Desa di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal?
2. Bagaimana proses evaluasi Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Pegiat Desa di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal?
3. Bagaimana ketersediaan instrumen evaluasi untuk Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Pegiat Desa di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal?

4. Bagaimana mengembangkan instrumen evaluasi reaksi terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Pegiat Desa di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah yang disajikan, penelitian ini diberikan batasan ruang lingkup agar lebih terfokus dan terarah pada keempat poin, yaitu:

1. Jenis Masalah: Bagaimana mengembangkan instrumen evaluasi reaksi terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Pegiat Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal?
2. Fokus Pembahasan: Pengembangan instrumen evaluasi reaksi pada pelaksanaan Bimtek untuk mengukur respon dan umpan balik dari peserta. Penelitian ini tidak mencakup evaluasi seluruh tingkat program pelatihan menurut model Kirkpatrick dan Blanchard & Thacker yang mencakup evaluasi aspek pembelajaran, perubahan perilaku, atau hasil jangka panjang lainnya.
3. Produk yang akan dikembangkan:
 - a) Kisi-Kisi Instrumen Evaluasi Reaksi
 - b) Instrumen Evaluasi Reaksi
 - c) Pedoman Evaluasi Reaksi

4. Sasaran: Pegiat Desa yang mengikuti program Bimbingan Teknis di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
5. Lokasi: Pelaksanaan penelitian dilakukan di bawah unit Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berlokasi di Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan, 12750, DKI Jakarta.

D. Tujuan Pengembangan

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan instrumen evaluasi yang dapat digunakan sebagai alat ukur reaksi dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Partisipasi Pegiat Desa berdasarkan tanggapan subjektif peserta mengenai aspek dalam pelatihan. Instrumen ini diharapkan dapat mendukung evaluasi program pelatihan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

E. Kegunaan Pengembangan

Setelah memperhatikan masalah yang ada, pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Teoretis
 - a) Bagi praktisi dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan kajian serta evaluasi bagi praktisi dan akademisi yang tertarik dalam pengembangan instrumen evaluasi program pelatihan.

- b) Bagi peneliti di bidang Teknologi Pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau referensi tambahan bagi peneliti lain dalam bidang Teknologi Pendidikan, khususnya terkait pengembangan instrumen evaluasi yang komprehensif untuk meningkatkan keberhasilan pelatihan.

2. Praktis

1) Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman praktis dalam pengembangan instrumen evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan program pelatihan. Pengalaman dalam merancang dan menguji instrumen ini diharapkan dapat memperkuat keterampilan metodologis peneliti dalam mengembangkan evaluasi yang lebih komprehensif.

2) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Melalui unit P3MD, di bawah naungan BPSDM, besar harapan bahwa penelitian ini dapat mendukung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan keberhasilan Bimbingan Teknis melalui instrumen evaluasi reaksi yang komprehensif, sehingga program pelatihan dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan peserta.

3) Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan UNJ

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai proses pengembangan instrumen evaluasi yang terstruktur.

